



PROCEEDING KONFERENSI NASIONAL II

ISBN: 978-602-18912-1-6

BISNIS MEDIA DAN PERDAMAIAN

*Mendorong Peran Bisnis dan
Media dalam Resolusi Konflik dan
Pengembangan Perdamaian*

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UPN "VETERAN" YOGYAKARTA**

13 NOVEMBER 2013

PROCEEDING
KONFERENSI NASIONAL II

Bisnis, Media dan Perdamaian:

Mendorong Peran Bisnis dan Media dalam Resolusi
Konflik dan Pengembangan Perdamaian



13 November 2013

Diselenggarakan oleh:
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Yogyakarta

DAFTAR ISI

| | |
|----------------|-----|
| Halaman Judul | i |
| Daftar Isi | ii |
| Kata Pengantar | iii |

Bisnis dan Perdamaian

| | |
|--|----|
| 1. Efektivitas Program Penjualan UMKM Pasca Bencana Erupsi Merapi di Daerah Istimewa Yogyakarta | 1 |
| <i>Danung Yudhiantoro, Humam Santosa, Didit Herlianto</i> | |
| 2. Peran Penting Jiwa Kewirausahaan dalam Mengembangkan Usaha baru Pasca Bencana | 23 |
| <i>Eny Endah Pujiastuti</i> | |
| 3. Corporate Social Responsibility: Peluang dan Tantangan bagi Organisasi Bisnis | 45 |
| <i>Meilan Sugiarto</i> | |
| 4. Jejaring UKM Berbasis Produk Sejenis di Era Global | 64 |
| <i>Supardal</i> | |
| 5. Analisis Return dan Risiko Pada Investasi Saham | 85 |
| <i>Asih Marini Wulandari</i> | |

Media dan Perdamaian

| | |
|--|-----|
| 6. Management Strategic of Jawa Pos Groups: Regional Autonomy, Market and Media | 102 |
| <i>Yenni Sri Utami & Heroe Poerwadi</i> | |
| 7. Peran Media dalam Proses Edukasi Politik Pemilih Pemula | 119 |
| <i>Adi Soeprapto, Susilastuti, DN, Basuki Agus Suparno</i> | |

| | | |
|-----|--|-----|
| 8. | Media dalam Pusaran Arus Konflik Politik Menuju Pemilu 2014 | 151 |
| | <i>Susilastuti. DN</i> | |
| 9. | Mengkaji Peran Media Massa dalam Penanggulangan Terorisme | 169 |
| | <i>Anik Yuniarti</i> | |
| 10. | Model Manajemen Jaringan Teknologi Komunikasi yang Mendukung Operasional Sistem Pemerintahan dalam Pembangunan dan Penganggulangan Bencana Alam | 185 |
| | <i>Edwi Arief Sosionan</i> | |
| 11. | Manajemen Komunikasi Bencana Gunung Sinabung 2010 Saat Tanggap Darurat | 217 |
| | Puji Lestari, Icha Dwi Putri Br Sembiring Agung Prabowo, Arif Wibawa, Retno Hendaziningrum | |

Peacemaking

| | | |
|-----|---|-----|
| 12. | Understanding the Darfur Conflict | 248 |
| | <i>Desy Nur Aini</i> | |
| 13. | ASEAN's Soft Balancing Strategy Between the US and China: the Case of South China Sea Dispute | 272 |
| | <i>Ludiro Madu</i> | |
| 14. | Membangun Perdamaian dari Perspektif Perempuan | 290 |
| | <i>Machya A. Dewi</i> | |
| 15. | Strategi Perdamaian Positif Melalui Pendekatan <i>Peace Building</i> | 308 |
| | <i>Suryo Wibisama</i> | |
| 16. | Mengelola Konflik di Perbatasan melalui Optimalisasi Fungsi Pos Lintas Batas (PLB) di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. | 326 |
| | <i>Iva Rachmuwati & Fauzan</i> | |

UNDERSTANDING DARFUR CONFLICT

Oleh

Desy Nur Aini

Pengajar Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

FISIP UPN "Veteran" Yogyakarta

Email: desynuraini87@gmail.com

Abstract

Africa is a region that has still problems of poverty, famine and drought that trigger to conflict. Darfur is a part of Sudan, Africa that has one of the worst conflicts in the last decade. There are two parties, which are Sudan Liberation Movement/Army (SLM/A) that join another armed political group Justice and Equality Movement (JEM) and the armed nomadic group or Sudanese Government Army (Arab Militia) called 'Janjaweed'. The SLA and JEM has similar demands which are to end the political and economic marginalization and to protect their community against Janjaweed's attack (ethnic cleansing). The warfare between two parties happened in Darfur in early 2003. There are so many victims caused by violation of Janjaweed such as killing, looting and rape. It could be said as a complicated issue which needs special attention from the international community. This paper will analyze details about how conflict that occurred in Darfur by using the concept of "Paul Wehr". There are three components that could be identified how the Darfur conflict occurs includes Context, Parties and Causes and Consequences. The international community also effort and involved in the process of peace in Darfur. In conclusion, let me reiterate that the main point to end this conflict is based on the willingness of the conflicting parties, especially the Government of Sudan and its military. Although, the peace building efforts have not succeeded, at least the conflict could be managed. As a result, an open warfare in Darfur can be prevented.

Keywords: *ethnic cleansing, the concept of Paul Wehr, international community, peace building efforts*

Pendahuluan

Secara geografis, Darfur merupakan wilayah bagian dari Sudan di Afrika yang terletak di bagian utara yang berbatasan dengan negara Chad yang mana

wilayahnya terdiri dari hamparan padang pasir yang luas dan padang rumput yang kering. Wilayah ini secara garis besar memang masih menjadi wilayah yang disertai dengan masalah kemiskinan, kelaparan, bencana yang berkepanjangan. Walaupun sudah dibentuk sebuah organisasi *Intergovernmental Authority on Development* (IGAD) oleh tujuh negara Afrika termasuk Sudan yang difasilitasi oleh PBB, namun kemiskinan, kelaparan dan kekeringan yang berkepanjangan tidak dapat ditangani secara tuntas dan membuat semakin lama banyak penduduk yang tidak mendapatkan sumber air termasuk di Darfur. Air dan tanah merupakan sumber kehidupan yang sangat vital dan diperebutkan di Darfur karena sebagian besar wilayahnya gersang dan tidak subur. Hal ini membuat mudah sekali memien timbulnya konflik.

Kasus Darfur merupakan salah satu tantangan isu kemanusiaan yang paling kompleks. Akar masalahnya adalah bermula dari adanya marginalisasi ekonomi (terhadap akses sumber daya air, tanah dan lainnya) dan politik (lebih condong kepada milisi Arab) yang menyebabkan munculnya kelompok pemberontak terhadap Pemerintahan Sudan. Perang mulai intensif di awal tahun 2003, ketika kelompok pemberontak bernama Tentara Pembebasan Sudan atau *Sudan Liberation Movement/Army* (SLM/A) menyerang kelompok militer Pemerintah Sudan. SLA pun bergabung dengan kelompok politik bersenjata lainnya yaitu *Justice and Equality Movement* (JEM)⁴. Eskalasi konflik terjadi antara kelompok pemberontak (SLM/A dan JEM) dan militer Pemerintah Sudan yang disebut juga 'Janjaweed'. Konflik dapat dideskripsikan sebagai '*a struggle over values and claim to scarce status, power and resources*' (Boulding, 1962:5). Janjaweed menyerang dengan membombardir dan membakar wilayah kota dan desa di Darfur yang dicurigai menyembunyikan simpatisan kelompok pemberontak. Serangan 'Janjaweed'

⁴ SLM/A dan JEM merupakan kelompok pemberontak bersenjata gabungan dari suku-suku Afrika asli (kelompok Non-Arab) di Darfur yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Mereka adalah penduduk asli yang termarginalkan oleh Pemerintahan Sudan.

menyebabkan banyak orang sipil yang terbunuh, penjarahan, pemerkosaan dan pengungsian secara besar-besaran. Jan Egeland² menganggap kekerasan di Darfur merupakan kasus *ethnic cleansing*.

Banyak orang berpendapat bahwa kasus Darfur merupakan krisis kemanusiaan paling buruk di dunia. Konflik Darfur memberikan dampak negatif khususnya kepada penduduk sipil diantaranya *pertama*, banyak penduduk sipil yang menjadi sasaran dalam kekerasan tersebut dan terjadilah pengungsian secara besar-besaran untuk mencari tempat yang aman dan mengungsi bahkan sampai mengungsi ke negara tetangga, seperti Chad. Diperkirakan lebih dari 700.000 orang mengungsi ke pusat perkotaan Darfur, termasuk ke Khartoum, 135.000 orang mengungsi ke Chad dan ribuan orang meninggal akibat kekerasan, penyakit akibat konflik.³ *Kedua*, banyak korban terutama berasal dari suku Afrika asli yang menderita kelaparan, penduduk kekurangan pangan, dan menularnya penyakit. Hal ini dikarenakan bantuan kemanusiaan yang sulit mengakses masuk ke wilayah Darfur untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk sipil yang beresiko mengalami kematian. *Ketiga*, hancurnya infrastruktur (*public services*) seperti rusaknya banyak desa, jalan, sekolah dan klinik kesehatan akibat perang yang dilakukan antara SLA-JEM dan *Jarjaveed*. Menurut *United Nations News Centre*⁴ (2006) menyebutkan bahwa jumlah korban yang meninggal akibat konflik di Darfur lebih dari 200.000 orang, 2 juta orang mengungsi dan 4 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan.

Dalam makalah ini, penulis mencoba untuk menjelaskan secara lebih detail tentang pemahaman konflik Darfur secara komprehensif yang meliputi understanding yang berisi tentang deskripsi dan konteks tentang

² *The United Nation's Emergency Relief Coordinator*

³ IFPG Briefing Note, 2004. "Humanitarian Issues in Darfur." Diakses dari www.odh.org/uk/hbg. Diakses pada 8 Oktober 2013

⁴ United Nations News Centre, 2006. "4 Million People in Darfur Now Need Humanitarian Aid, Top UN Relief Official Says." Diakses dari www.un.org/news, dalam *Triah Chang, 2007. "Displaced in Darfur"* dalam KAIPTC Paper No. 18, June 2007 diakses pada 8 Oktober 2013

13 yang terdiri dari suku Razaigad, Mabariya, Irayqat dan Hubaniya. Mereka hidup nomaden (berpindah-pindah) yang umumnya sebagai perternak. Kedua, Kelompok Non-Arab, merupakan orang Afrika asli yang terdiri dari suku Fur, Zaghawa, Massalit, Tunjur, Bergid dan Berti. Pada umumnya kelompok ini tinggal di bagian Darfur tengah dan barat. Sebagian besar mereka hidup sebagai petani, kecuali suku Zaghawa. Zaghawa merupakan suku yang terlatih secara militer dan suku inilah yang bergabung menjadi pendukung SLM/A dan JEM.

Konflik secara horizontal pun mulai terjadi yakni ditandai dengan adanya polarisasi Darfur yakni suku Arab (pendatang) dan suku Afrika (asli). Konflik horizontal antar etnis pun terjadi dimulai tahun 1968 sampai dengan 1998. Polarisasi tersebut semakin condong ke arah konflik vertikal ketika Pemerintahan Shadiq Al-Mahdi mempersenjatai dan melatih kelompok/milisi Arab untuk menghadapi Kelompok Pemberontak Sudan SLM/A dan JEM yang umumnya mereka adalah orang Afrika asli, namun termarginalkan di hampir semua aspek yakni ekonomi, sosial dan politik. Kondisi ini terus berlanjut pada masa Presiden Bashir. Kelompok Non-Arab terutama suku Zaghawa pun mulai mempersenjatai diri dan mengadakan latihan militer bersama dengan Kelompok Non-Arab lainnya. Kelompok ini lebih condong kepada pemimpin SLM/A yang bertujuan mengutamakan demokrasi dan persamaan hak dan kewajiban setiap warga negara.

Latar Belakang Konflik

Dalam kasus konflik Darfur, konflik yang terjadi merupakan konflik yang berkonotasi negatif yang mana bersifat destruksi (*violence character of the conflict*) yang berkaitan khususnya dengan kekerasan suku yaitu antara suku Arab (*Jarjawaed*) dan suku Afrika asli yang tergabung dalam pemberontakan

Sudan Liberation's Army (SLA) dan Justice and Equality Movements (JEM). Konflik Darfur mempunyai dimensi konflik manifes atau terbuka yang mana dari konflik perselisihan yang terpolarisasi berubah menjadi kekerasan dan akhirnya berubah menjadi perang termasuk pembunuhan dan pembantaian terhadap warga, pemerkosaan terhadap perempuan dan membakar desa-desa. Secara historis, konflik di Darfur muncul karena ketidakadilan pemerintahnya yang lebih pro suku Arab dimana lebih banyak dikuasai orang Arab yang merupakan suku yang paling dominan. Terbukti tahun 1980an pemerintah mengganti *tribal council* dengan program pemerintah. Oleh karena itu, menjadi jelas bagaimana konflik ditangani ketika terjadi perselisihan antara suku Arab dan Afrika karena suku Arab mendominasi pemerintah.

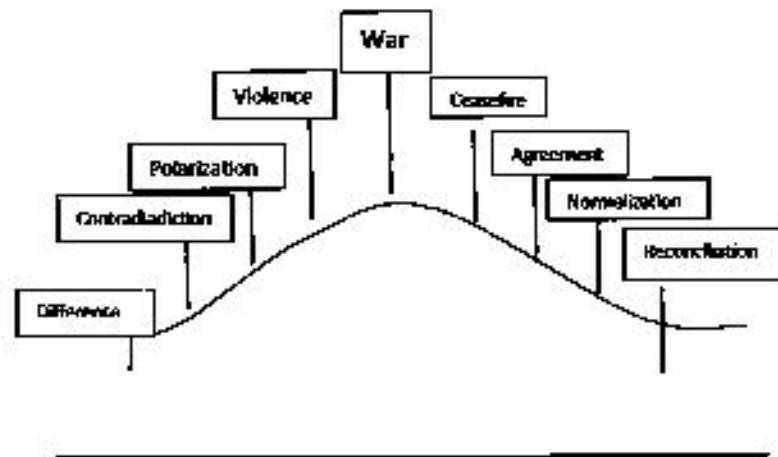
Menurut Abdul Hadi Adnan⁵ (2006) menyebutkan bahwa krisis di Darfur merupakan konflik internal, namun berdampak pada negara tetangga khususnya Chad dan konflik ini yang terjadi karena: *Pertama*, Pada tahun 1968-1998 terjadi 29 konflik bersenjata namun masih dalam skala kecil. Penyebabnya karena perebutan sumber daya alam seperti air, tanah dan ladang peternak maupun cocok tanam, merupakan hal yang sangat vital di Darfur. *Kedua*, faktor politik. Hal tersebut dikarenakan adanya ketidakpuasan dan ketidakadilan perlakuan Khartoum yang menyebabkan serangan Kelompok Pemberontak SLM/A dan JEM kepada militer Pemerintahan Sudan. SLM/A dan JEM bergabung karena mempunyai tujuan yang sama yaitu adanya keinginan untuk mengakhiri marginalisasi ekonomi, sosial dan politik di Darfur dan melindungi komunitas mereka dari serangan kelompok nomaden yang dipersenjatai oleh Pemerintah Sudan. *Ketiga*, faktor sosial dan ekonomi. Kekeringan yang berkepanjangan selama 30 tahun

⁵ Mantan Duta Besar RI untuk Sudan, 2006, dalam "Penyelesaian Masalah Sudan Selatan dan Krisis di Darfur." Diakses dari www.umppa.ac.id pada 22 Oktober 2013

melanda daerah gurun pasir wilayah Afrika pada umumnya dan Darfur khususnya di wilayah Al-Fashir, Nyala dan Al-Jenina. Hal itu menyebabkan kesengsaraan bagi penduduk yang bergantung kepada hasil pertanian dan peternakan. Oleh karena itu, sumber daya air merupakan sesuatu yang sangat vital bagi kehidupan, namun malah menjadi komoditas langka. Keadaan inilah yang memicu konflik semakin terekskalasi dan kekerasan pun terjadi.

Perselisihan untuk mendapatkan sumber-sumber kehidupan terutama terhadap air dan tanah terus meningkat dan tidak ada sistem legitimasi untuk mengatasi masalah itu lagi. Pada saat yang bersamaan, Darfur dilanda oleh musim kemarau yang panjang dan kekeringan dan inilah yang menjadi pemantik mengapa konflik cepat terjadi. Sehingga faktor-faktor tersebutlah yang akhirnya membawa masalah pada kemiskinan yang berkepanjangan di Darfur. Perselisihan yang terjadi antara suku Arab yang mana telah dipersenjatai oleh pemerintah dan suku Afrika yang minoritas muslim yang terabaikan haknya yang mana kedua suku tersebut makin terpolarisasi dan berubah menjadi kekerasan (*violent*). Ketika SLA dan JEM memberontak kekerasan sudah tak dapat dicegah lagi, dan makin terekskalasi dan akhirnya terjadi perang antara Janjaweed dan SLA-JEM. Agar lebih memahami kasus konflik Darfur secara lebih komprehensif maka dapat dilihat seperti gambar di bawah ini:

Gambar 1. Conflict escalation and de-escalation



Sumber: Glasl, 1982 ; Fisher and Keasbly, 1991

Analisis Konflik dan Perdamaian

Untuk menganalisis kasus konflik di Darfur, penulis menggunakan Konsep *Paul Wehr* yang diaplikasikan dalam menjelaskan konflik tersebut berdasarkan komponen-komponen seperti *context* atau gambaran yang berisi informasi secara detail tentang konflik Darfur tersebut, mengidentifikasi siapa saja aktor yang terlibat (*parties*), bagaimana posisi atau sikap dan kepentingannya dan juga dinamika konflik di Darfur yang menjelaskan pergeseran dari *root causes* sampai *consequences* nya.

Dalam menjelaskan *Context* kasus konflik Darfur, penulis mencoba menggambarkan secara detail bagaimana kondisi sosial, ekonomi dan politik di Darfur. Dalam kaitannya dengan konflik, ada beberapa pra-kondisi yang

mengarah terjadinya konflik.⁶ *Pertama*, adanya hubungan yang tidak harmonis antar kelompok identitas seperti suku yang mana pemerintah cenderung berupaya mengeliminasi demi kepentingan eksistensinya. Akibatnya, terjadi alienasi terhadap kelompok identitas tertentu dan juga mendorong untuk menentang atau memberontak terhadap kekuasaan negara atau lembaga yang merepresentasikannya. Dalam kasus Darfur, pemerintah cenderung tidak mengakui eksistensi kelompok identitas yang minoritas suku Afrika yang termarginalkan yang pada akhirnya tergabung dalam pemberontakan yang disebut *Sudan Liberation's Army* (SLA) bersama *Justice and Equality Movements* (JEM) dan bahkan pemerintah berusaha untuk mengeliminasi suku (*ethnic cleansing*) tersebut. Selain itu, pemerintah juga mempersenjatai *Janjaweed* yang mana terdiri dari suku Arab yang dominan untuk melawan SLA dan JEM. *Kedua*, konflik muncul karena kegagalan pemerintah dalam pemenuhan hak kebutuhan dasar kemanusiaan sehingga terjadi proses kemiskinan secara berkelanjutan. Kebutuhan dasar disini tidak hanya dalam aspek ekonomi saja tetapi juga kebutuhan rasa aman dan juga pengakuan dalam proses penyelenggaraan kekuasaan pemerintah. Ketidakadilan pemerintah dan penyalahgunaan otoritas yang lebih mengutamakan kepentingan *Janjaweed* atau lebih pro Arab dibanding dengan suku Afrika yang sering terjadi perebutan air dan tanah karena wilayahnya yang tidak subur. Oleh karena itu, proses *deprivation* tersebut telah mengakibatkan kantong-kantong kemiskinan yang terus berlanjut di Darfur dan memicu suku Afrika yang terabaikan memberontak pada pemerintah. Selain itu, peran militer (polisi) yang terlalu kecil dalam mengontrol negara sehingga tidak ada rasa aman bagi masyarakatnya, termasuk adanya konflik tahun 2003 yang terkeskalasi menjadi konflik terbuka yang terjadi antara *Janjaweed* terhadap SLA dan JEM yaitu aksi

⁶ Azar, Edward. 1990. *The Management of Protracted Social Conflict: Theory and Cases.* Aldershot: Dartmouth. Empat pra-kondisi ini secara detail dijelaskan dalam Hugh Miall hal 72-75.

pembunuhan, pembantaian, merusak fasilitas publik dan juga termasuk dehumanisasi seperti membakar anak kecil dan menjadikan perempuan sebagai budak seksual mereka. *Ketiga*, konflik terjadi karena berkaitan dengan karakteristik pemerintahan (*governance*) yang otoriter dan mengabaikan aspirasi dari *grassroots*. Adanya rasa tidak puas dan frustrasi yang mendalam dikarenakan tekanan stabilitas politik dan keamanan secara kaku yang telah mengabaikan hak sipil dan politik dari kelompok etnis tertentu. Bahkan, kekuatan militer yang ada digunakan untuk menindas setiap bentuk protes dan perlawanan terhadap kekuasaan pemerintah yang otoriter dan tidak adil. *Janjaweed* disebut juga *devil on horseback* dengan karakter yang jahat yang umumnya mereka menggunakan kuda saat menindas setiap pemberontakan dan bahkan penduduk lokal yang tidak bersalah juga ikut menjadi korban kekerasan mereka. Terbukti, *Janjaweed* yang telah dipersenjatai oleh pemerintah telah bertindak sewenang-wenang melakukan kekerasan terhadap sesama suku Arab yang lain maupun suku Afrika dan juga melawan pemberontakan oleh SLA dan JEM. Suku Afrika yang tergabung dalam pemberontakan SLA dan JEM dikarenakan kondisi mereka miskin yang tidak mendapatkan akses ekonomi dan sosial. Walaupun pemerintah Sudan dianggap otoriter, namun tetap saja peran polisi dan militer dinilai gagal melindungi dan mengontrol stabilitas keamanan dan negara pun dianggap mengabaikan hak-hak dasar dan aspirasi masyarakat.

Parties atau pihak yang terlibat dalam konflik yaitu antara *Janjaweed* yang terdiri dari suku Arab yang dominan dan pemberontak *Sudan Liberation's Army* (SLA) bersama Justice and Equality Movements (JEM) yang terdiri dari suku Afrika yang termarginalkan. Secara politik, pemerintah Darfur yang lebih pro Arab telah mempersenjatai *Janjaweed* (Arab nomads) untuk menumpas pemberontak SLA dan JEM. Dimana SLA dan JEM merupakan kumpulan suku Afrika asli yang pada umumnya

bermata pencaharian sebagai petani. SLA dan JEM adalah penduduk muslim yang minoritas dan *powerless*. Kepentingan SLA dan JEM yaitu memprotes dan memberontak agar mendapatkan keadilan dari Pemerintah yang telah memperparah kondisi ekonomi mereka. Pemerintah dianggap telah menyalahgunakan kekuasaan dan otoritas secara politik dan peranan kekuatan militer juga sangat kecil yang tidak mampu untuk melindungi keamanan penduduk lokal Darfur. *Janjaweed* bukan merupakan representatif semua wilayah Darfur, tetapi kelompok ini juga sering menyerang sesama suku Arab di Darfur, sering melakukan pemerkosaan, pembunuhan, penjarahan termasuk juga membakar desa. Memang ada kepentingan mengapa *Janjaweed* melakukan kekerasan itu yaitu memang adanya motif pribadi terhadap orang Afrika serta ingin membersihkan Darfur dari suku Afrika. Ditambah semakin memiliki *power* ketika Pemerintah mempersejatkan kaum *Janjaweed* ini.

Root causes atau akar masalahnya yaitu kemiskinan karena ketidakadilan dan penyalahgunaan otoritas pemerintah yang otoriter yang mendiskriminasikan suku Afrika asli dan lebih membela *Janjaweed*. Akibatnya masyarakat terutama suku Afrika asli kesulitan dalam memenuhi hak-hak kebutuhan dasarnya termasuk mendapatkan akses ekonomi dan sosial. Mittelman and Tambe (2000:171) mendeskripsikan kemiskinan sebagai:

'the experience and perception and marginalization that have been locked in through structural pressure and marginalization should be understood as a process of decreasing returns from increasing efforts that are linked up to work relations in the global economy'.

Tidak terpenuhinya hak-hak dasar menimbulkan kecemburuan bagi masyarakat yang termarginalkan yang akhirnya memberontak karena kemiskinan yang berkelanjutan. Pemahaman terhadap ancaman perdamaian pun telah mengalami pergeseran atau modifikasi sehingga mencakup juga

genocide, kekerasan massal terhadap hak asasi manusia, dan termasuk *ethnic cleansing*.⁷ Konflik Darfur terjadi antara suku Afrika asli yang termarginalkan dengan suku Arab yang dominan sebagai representatif pemerintah. Maka, pemerintah berupaya untuk mengeliminasi suku Afrika asli (*ethnic cleansing*) dengan mempersenjatai *Janjaweed*. Tahun 1983, juga adanya diskriminasi yang mana Pemerintah ingin menerapkan Shariah Law. Yang mempercepat atau pemicu konflik ini terekskalasi (*proximate cause*) adalah karena adanya *environmentally challenges* atau perubahan lingkungan yang menyebabkan kekeringan yang justru memperparah kemiskinan, menyebarkan penyakit dan kelaparan di wilayah Darfur yang menyebabkan pemberontakan SIA dan JEM. Di luar kasus tersebut, di Sudan sendiri juga terdapat polarisasi antara bagian utara dan selatan dimana bagian utara mayoritas orang Muslim dan selatan mayoritas orang Kristen dan Animisme yang keduanya saling memperebutkan cadangan sumber daya minyak di perbatasan. Menurut Jamera (2003) menyatakan bahwa cadangan minyak di Sudan tidak sebesar di Arab Saudi dan Irak, tetapi jika ini dikelola dengan baik akan mendatangkan keuntungan bagi negara miskin Sudan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita setiap tahunnya diperkirakan mencapai sebesar 424 USD.

Consequences atau akibat yang ditimbulkan kasus konflik Darfur yaitu *pertama* kekerasan yang terjadi telah banyak menimbulkan korban masyarakat lokal dan *refugee* (pengungsi) secara besar-besaran untuk mencari tempat yang aman dan bahkan sampai mengungsi ke negara tetangga, Chad. *Kedua*, banyak korban terutama berasal dari suku Afrika yang menderita kelaparan, penduduk kekurangan pangan, menularnya penyakit yang tidak disertai dengan akses pelayanan kesehatan yang baik. *Ketiga*, hancurnya infrastruktur (*public services*) seperti rusaknya banyak

⁷ Wallensteen, Peter. 2002. "Understanding Conflict Resolution. War, Peace and Global System." London. Sage Publisher, hal 235

desa, jalan, sekolah dan klinik kesehatan akibat perang yang dilakukan antara SLA-JEM dan *Janjaweed*. Konsekuensi yang ditimbulkan apabila konflik ini terus terjadi tanpa adanya resolusi konflik yaitu semakin besar kerugian yang di dapat karena memperparah kondisi sosial, ekonomi dan politik penduduk di Darfur yang mana perang tersebut dapat membawa Darfur pada titik kelelahan. Selain itu, kasus konflik Darfur dapat berimbas secara negatif baik secara fisik maupun non-fisik (mental), dan juga ada trauma secara psikologis yang mendalam terutama bagi kebanyakan penduduk lokal suku Afrika asli yang menjadi korban atas konflik yang terekskalasi menjadi kekerasan tersebut.

Menangani Konflik

Conflict management is the positive and constructive handling of difference and divergence. Rather than advocating methods for removing conflict, it addresses the more realistic question of managing conflict: how to deal with it in a constructive way, how to bring opposing sides together in a cooperative process, how to design a practical, achievable, cooperative system for the constructive management of difference (Bloomfield and Reilly, 1998:18).

Pada bagian ini merupakan asumsi bahwa setiap konflik dapat diselesaikan. Dalam hal ini, termasuk bagaimana mekanisme kasus konflik Darfur agar dapat dikelola atau diselesaikan. Penulis mencoba menjelaskan bagaimana konflik Darfur dikelola dengan *conflict management* yang mengubah dari sesuatu yang bernuansa kekerasan menjadi sesuatu yang tidak destruktif tetapi memang konfliknya masih tetap ada dengan cara berusaha membatasi dan mengendalikannya agar tidak muncul melalui regulasi. Dalam menyikapi konflik internal, PBB harus melakukan intervensi dan mencoba menawarkan solusi demi kemanusiaan dengan prinsip-prinsip

yang meliputi *pertama*, intervensi PBB dilakukan berdasarkan permintaan atau persetujuan dari pemerintah negara berdaulat. *Kedua*, perlunya penekanan pada the consent of the legitimate government. *Ketiga*, menempatkan kepentingan penduduk lokal di atas kepentingan pemerintah yang mana solidaritas kemanusiaan lebih penting daripada prinsip kedaulatan negara. *Keempat*, perlunya membangun mekanisme pemerintahan yang dapat berfungsi sehingga dapat menciptakan tata tertib dan menjalankan fungsi-fungsi dasar lainnya. *Kelima*, intervensi yang dilakukan harus mencegah agar situasi konflik dapat segera dikendalikan untuk menghindari jatuhnya korban dalam jumlah besar.⁸ Ketidakanampunan untuk mengatasi pembantaian ribuan jiwa di Darfur oleh Janjaweed yang dipersenjatai oleh Pemerintah menunjukkan intervensi yang dilakukan oleh PBB masih sangat terbatas dan masih lamban dalam mengantisipasi konflik terbuka dan kekerasan. Meskipun masih terdapat konflik terutama motif pribadi Janjaweed terhadap suku Afrika asli, tetapi konflik terbuka sudah berhenti meski dengan proses yang lama.

Intervensi dalam Konflik

"...it is considered to be a moral and legal duty not to attack, wound, or kill noncombatant civilians purposely. Injuries and death suffered by them as incidents of military operations, such as the bombardment of a town or a battle taking place in an inhabited area, are regretted as sometimes unavoidable concomitants of war." (Morgenthau, Hans J and Thompson, K., 1985)

Agenda for peace merupakan poin utama sebagai agenda keterlibatan PBB untuk perdamaian dan bagaimana solusi yang ditawarkan PBB dapat secara efektif dalam memainkan perannya untuk membangun perdamaian dunia yang mana juga terkait dengan bagaimana perlindungan penduduk lokal atau korban dalam kasus konflik di Darfur, Sudan. Konflik Darfur

⁸ Wallerstein, Peter. 1997. *New Actors, New Issues, New Actions.* Department of Conflict and Peace Research: Upsala University hal 5-7

merupakan masalah yang kompleks. Ketentuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang melarang ancaman, penggunaan kekuatan dan prinsip-prinsip pemusnahan golongan bangsa merupakan aturan-aturan dan banyak persetujuan tidak tertulis yang berasal dari keyakinan yang tersebar luas yang menyatakan bahwa penggunaan kekuatan ataupun pembinasaaan secara sistematis pada kelompok agama dan etnis secara inheren adalah tidak bermoral dan secara etis patut dicela.⁹ Kasus pembantaian, pembunuhan, perusakan infrastruktur, *sexual harassment* dan *ethnic cleansing* pada suku Afrika asli memang sepatantasnya harus dihentikan karena selain bertentangan dengan etis juga berkaitan dengan pelanggaran HAM.

Preventive Diplomacy merupakan semua tindakan untuk mencegah konflik terbuka menjadi konflik yang lebih luas yang melibatkan banyak pihak yang dilakukan oleh elit dan dapat dilakukan pada saat konflik terjadi. Target minimalnya yaitu mencegah konflik terbuka dan *early warning* merupakan kemampuan untuk mengetahui konflik akan terjadi. Preventive diplomacy¹⁰ dapat diartikan

...is of special significance in cases where the original conflict may be said either to be the result of, or to imply risk for, the creation of power vacuum between the main blocs. Preventive action in such cases must, in the first place, aim at filling the vacuum so that it will not provoke action from any of the major parties. The ways in which a vacuum can be filled by the United Nations..." (Roy, S.L, 1984)

Maka dapat diartikan bahwa setiap upaya yang dilakukan adalah untuk mengakhiri peperangan sesegera mungkin yang mana tidak akan menanam benih perang di kemudian hari. Pihak yang berkonflik dapat berupaya melalui perlindungan dari PBB dengan menjaga perselisihan agar tidak terkait

⁹ Holsti, K.J. 1983. *International Politics, a Framework for Analysis, Fourth Edition.* Prentice-Hall, Inc.

¹⁰ Roy, S.L. 1984. *Diplomacy.* India: Sterling Publisher Pvt. Ltd., hal 123

dengan situasi yang penuh ancaman yang dapat memperluas konflik. Dalam kasus Darfur, PBB kurang cepat dalam melakukan preventive diplomacy dan dinilai kurang berhasil karena sudah banyaknya korban yang jatuh akibat pembantaian ribuan penduduk lokal, pembunuhan dan pemerkosaan terhadap perempuan Darfur. Meski dengan proses yang lama antara Janjaweed dan SLA-JEM akhirnya gencatan senjata tersebut dapat dilakukan. Sekurang-kurangnya PBB dalam *early warning* selanjutnya masih dianggap berhasil dalam mencegah terulangnya kekerasan termasuk pembantaian penduduk lokal di Darfur.

Upaya perdamaian melalui *Peacekeeping* yaitu merupakan sebuah misi agar gencatan senjata tetap bertahan dan aktifitas bantuan internasional dapat masuk walaupun mandatnya masih sangat terbatas. Menurut Jemadu (2008) *peacekeeping* adalah proses menghentikan atau mengurangi aksi kekerasan melalui intervensi militer yang menjalankan peran sebagai penjaga perdamaian yang netral. Dalam konflik Darfur, PBB harus bekerjasama dengan Uni Afrika dalam menjalankan misi perdamaianya melalui UNMIS dan UNAMID yang melibatkan 13.021 personel dalam *The Economist* (6 Januari 2007). Pada tahun 2004, Uni Afrika mengupayakan perdamaian antara kelompok pemberontak SLM/A dan JEM dan Pemerintah Sudan yaitu dalam gencatan senjata dan pengiriman Tim Pemantau, namun kekerasan tetap terjadi. Misi Uni Afrika mengirimkan pasukan bersenjata dari Rwanda di wilayah Darfur untuk menstabilkan atau upaya normalisasi kondisi di Darfur. Misi ini hampir selalu dibutuhkan untuk menghentikan setiap peristiwa berdarah dalam peperangan. IDPs dari PBB adalah untuk melindungi para pengungsi, membantu dalam menyediakan makanan, kemudahan akses kesehatan dan menghentikan krisis keamanan yang disebabkan oleh kekerasan dan terror yang terjadi setiap hari di Darfur.

Bantuan kemanusiaan internasional seperti UNICEF juga telah banyak membantu korban dan mendirikan tempat untuk pengungsian.

Intervensi militer datang dari Uni Afrika yang mana berupaya untuk mengirimkan 3000 pasukan untuk menjaga keamanan wilayah Darfur. Terkait dengan hal tersebut, ada bantuan donasi dari Uni Eropa sebesar 125 juta USD dan juga Amerika Serikat juga berkontribusi sebesar 2,5 juta USD. Abdul Hadi Adnan¹¹ (2006) menyebutkan bahwa Uni Afrika mengirimkan 6000 personel dalam *African Union Mission in Sudan (AMIS)* yang diperkirakan memerlukan biaya 220 juta US\$ setahun. Masa tugas AMIS diperpanjang sampai dengan 2006 untuk mengakomodasi keinginan Sudan agar PBB tidak mengirimkan pasukan perdamaianya ke Sudan. PBB mengalokasikan 100 juta US Dollar, Uni Eropa memberikan bantuan sebanyak 80 juta Euro dan Kanada memberikan bantuan sejumlah kendaraan lapis baja. Upaya normalisasi Uni Afrika di Darfur merupakan langkah awal yang baik meski dalam pengiriman pasukannya masih butuh untuk dipersenjatai dan didanai. Tambahan lagi, *United Nations Security Council* juga memberikan sanksi secara tegas terhadap pembatasan penjualan minyak Sudan.

Dalam kaitan masalah Darfur, Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan sejumlah resolusi, antara lain:

| Resolusi | Tahun | Tentang |
|----------|-------|--|
| 1547 | 2004 | mengenai pembentukan U.N Advance Mission in Sudan (UNAMIS). |
| 1556 | 2004 | yang memerintahkan pemerintah Sudan menyatakan Sudan harus menghentikan kekejian milisi Arab di kawasan Darfur serta |

¹¹ Mantan Duta Besar Sudan

| | | |
|------|------|---|
| | | <p>menyuntuti senjata milisi Janjaweed dalam waktu 30 hari. Resolusi ini juga menuntut agar pemerintah Sudan menghukum orang-orang yang bertanggungjawab atas kejahatan. Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi untuk menjatuhkan sanksi atas Sudan, jika gagal menghentikan kekerasan di Darfur dalam jangka waktu yang telah ditentukan (30 hari). Resolusi ini tidak dipenuhi oleh Sudan, dan memicu sanksi penghentian sementara kegiatan diplomatik dan ekonomi.</p> |
| 1585 | 2005 | <p>memperpanjang mandat UNAMIS</p> |
| 1591 | 2005 | <p>mengenai sanksi DK PBB dalam wujud larangan bepergian dan pembekuan aset para pejabat Pemerintah dan pihak pemberontak yang diduga terkait dengan pelanggaran HAM di Darfur.</p> |
| 1593 | 2005 | <p>memberikan sanksi tambahan untuk Sudan, antara lain embargo senjata bagi pemerintah Sudan dan larangan pesawat Pemerintah Sudan melakukan operasi militer dan mengharuskan Pemerintah Sudan untuk melapor pada DK-PBB jika ingin mengirimkan peralatan militer ke wilayah Darfur. Resolusi juga menyangkut pengajuan tersangka pelanggaran HAM ke Mahkamah Internasional.</p> |
| | 2006 | <p>Delegasi Dewan Keamanan PBB tiba di Sudan untuk pertama kalinya. Mereka mencoba membujuk Pemerintah Sudan yang selama ini menolak adanya pasukan PBB karena berbagai kekhawatiran, untuk</p> |

| | | |
|------|------|---|
| | | menjelaskan bahwa sebuah operasi penjagaan perdamaian PBB di Darfur tidak sama dengan sebuah invasi. |
| 1769 | 2007 | DK PBB akan mengerahkan 26 ribu tentara dan polisi ke Darfur untuk memperkuat pasukan Uni Afrika. Sesuai dengan Resolusi, pasukan DK PBB akan bergabung dengan pasukan Uni Afrika hingga menjadi pasukan penjaga perdamaian baru yang disebut dengan UNAMID |

Sumber: Penulis, 2011, diolah dari berbagai sumber

Dalam upaya misi *Peacemaking* merupakan semua tindakan yang digunakan untuk menghentikan kekerasan dan menghasilkan kesepakatan agar dilakukannya gencatan senjata. Menurut Jemadu (2008) *peacemaking* adalah proses yang tujuannya mempertemukan atau merekonsiliasi sikap politik dan strategis dari pihak-pihak yang bertikai melalui mediasi, negosiasi dan arbitrase terutama pada level elit atau pimpinan. Bentuk yang dihasilkan yaitu berupa *negative peace* melalui intervensi militer di Darfur agar melakukan gencatan senjata. Pada bulan Mei 2005, pihak Pemerintah Sudan dan dua kelompok Pemberontak Darfur SLA dan JEM mencapai kesepakatan dengan menandatangani sebuah perjanjian Darfur Peace Agreement (DPA) dengan mediasi Uni Afrika, disertai desakan dari pihak AS dan Inggris di Abuja, Nigeria. *Darfur Peace Agreement* yang berisi tentang *a cease-fire* atau gencatan senjata dan *power-sharing agreement* atau pembagian kekuasaan yang hanya berfokus pada Darfur. Pasal krusial yang dituntut SLM/A dan JEM yaitu:

1. Pelucutan senjata juga berlaku bagi kelompok militer Pemerintah Sudan 'Janjaweed.'
2. Sebagian kelompok pemberontak diintegrasikan ke dalam angkatan bersenjata Pemerintah Sudan.

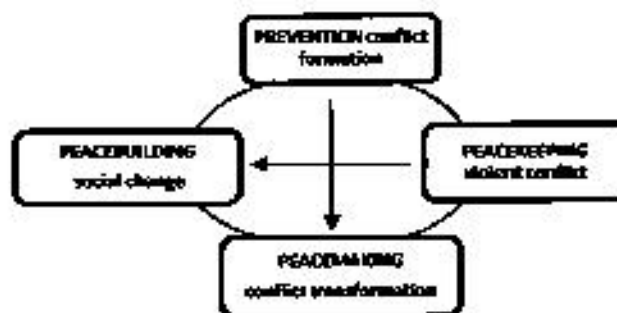
Namun, perjanjian damai tersebut tidak juga dapat menciptakan perdamaian di negeri Darfur. Pada bulan Juni 2006, Delegasi Dewan Keamanan PBB tiba di Sudan untuk pertama kalinya. Mereka mencoba membujuk Pemerintah Sudan yang selama ini menolak adanya pasukan PBB karena berbagai kekhawatiran, untuk menjelaskan bahwa sebuah operasi penjagaan perdamaian PBB di Darfur tidak sama dengan sebuah invasi, dan bahwa PBB tidak mempunyai niat mengambil alih negara itu. Semenjak perjanjian perdamaian tahun 2005, upaya-upaya internasional meningkat untuk membujuk Pemerintah Sudan mengizinkan PBB mengambil alih tugas penjagaan perdamaian di Darfur dari pasukan Uni Afrika yang berjumlah 7.000. Meskipun ini merupakan langkah yang dirasa belum memadai, tetapi tanpa *peacemaking* tidak dapat dilakukannya proses perdamaian yang lebih jauh lagi. Maka, *peace making* merupakan sesuatu tindakan yang sangat penting dilakukan.

Peacebuilding merupakan proses implementasi perubahan atau rekonstruksi sosial, politik dan ekonomi demi terciptanya perdamaian yang langgeng dan diharapkan *negative peace (the absence of violence)* berubah menjadi *positive peace* dimana masyarakat merasakan adanya keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi dan keterwakilan politik yang efektif.¹² Dalam kasus konflik Darfur, proses *peacebuilding* belum sepenuhnya dapat dilakukan dan memang membutuhkan proses rekonsiliasi yang panjang. Tetapi, setidaknya sudah ada potensial upaya dari pihak Janjaweed sebagai

¹² Galtung, Johan. 1975. "Three approaches to Peace: peacekeeping, peacemaking and peacebuilding." Dalam Peace, War and Defence – Copenhagen: Christian Ejlert dikutip dalam Hugh Miall hal 187

representative pemerintah dan kelompok SLA yang sepakat untuk menandatangani perjanjian damai yang bisa mengarah pada misi *peacebuilding*. Setidaknya respon dari Uni Afrika, Uni Eropa, dan negara maju seperti AS sudah cukup mampu untuk menghentikan perang lebih jauh lagi. Terbukti langkah operasi damai dengan pengiriman pasukan bersenjata dapat menjaga keamanan dan krisis di Darfur. Mungkin, para petani dan orang nomaden di Darfur dapat hidup bersama meski dengan sedikit air yaitu dengan membangun kanal atau sistem lain untuk membantu kehidupan mereka agar lebih baik. Darfur memang masih membutuhkan bantuan untuk melakukan rekonstruksi, membangun fasilitas publik seperti sekolah, jalan dan klinik kesehatan agar mereka dapat melakukan kegiatannya sehari-hari. Meskipun demikian, melalui tindakan dan perubahan ini setidaknya dapat membantu penduduk Darfur untuk memulai mentransformasikan konflik mereka kepada sesuatu yang lebih konstruktif daripada sebuah kekerasan.

Gambar 2. Dinamika Konflik dan Resolusi Konflik



Dari berbagai upaya yang dilakukan oleh PBB dalam mengirimkan pasukan perdamaian, Uni Afrika sebagai mediasi, negara-negara lain seperti AS, Uni Eropa dan Kanada yang memberikan bantuan dana serta lembaga kemanusiaan yang memberikan perlindungan bagi korban/penduduk sipil Darfur. Namun apabila dilihat dari faktanya, upaya tersebut tidak efektif. Hal tersebut karena tidak adanya keinginan dari Pemerintah Sudan untuk

melakukan damai dan juga sulit dalam memberikan akses kemanusiaan, militer Arab Pemerintah Sudan pun juga tidak dapat mengontrol kekerasan dan susah berkompromi dengan mediator untuk menyelesaikan konflik ini dengan kelompok Pemberontak

Kesimpulan

Konflik Darfur merupakan konflik internal yang mana akar masalahnya adalah kemiskinan dan ketidakadilan. Polarisasi semakin nampak ketika suku Afrika asli yang minoritas bermata pencaharian sebagai petani semakin termarginalkan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Masalah yang sering menjadi pemicu konflik adalah masalah kepemilikan tanah dan akses ke sumber air. Pemerintah yang menyalahgunakan otoritas dan memarginalkan suku Afrika asli membuat mereka bergabung dalam pemberontakan Sudan Liberation's Army (SLA) dan Justice and Equality Movement (JEM) yang memprotes ketidakadilan pemerintah karena kecemburuan. Janjaweed (Arab nomads) yang bukan merupakan representative semua wilayah Darfur, tetapi juga menyerang sesama suku Arab, menumpas SLA dan JEM dengan dipersenjatai pemerintah (*ethnic cleansing*). Perubahan lingkungan yang menyebabkan kekeringan menjadi pemantik konflik di Darfur karena banyaknya penduduk yang kelaparan, menularnya penyakit dan kemiskinan yang berkepanjangan. Kekerasan mulai terjadi pada tahun 2003, Janjaweed mulai menumpas pemberontakan SLA dan JEM dengan aksi pembunuhan, penjarahan, pembantaian, pemerkosaan dan pembakaran fasilitas publik. Kepentingan Janjaweed adalah membersihkan Darfur dari suku Afrika karena mereka mempunyai motif pribadi. Kekerasan terus tereskalasi dan akhirnya terjadi perang antara kedua belah pihak. PBB berupaya menangani konflik Darfur dengan berbagai strategi diantaranya *preventive diplomacy*, *peacemaking*, *peacekeeping* dan *peacebuilding*. PBB bersama Uni Afrika, Uni Eropa dan AS berupaya

menawarkan berbagai solusi dan bantuan, meski dinilai sangat lambat dalam penanganannya, upaya *peacemaking* untuk dilakukan gencatan senjata dan *power-sharing* dinilai berhasil dicapai melalui *Darfur Peace Agreement*. Pengiriman pasukan bersenjata, misi UNMIS, UNAMID, IDPs, UNICEF dan *United Nations Security Council* merupakan upaya untuk menstabilkan dan menormalisasi kondisi Darfur. Kunci utama untuk mengakhiri konflik ini adalah terletak pada pihak-pihak yang berkonflik, khususnya adanya keinginan (*willingnes*) dari Pemerintah Sudan dan kelompok militernya. Meski, belum berhasilnya upaya *peacebuilding* tetapi setidaknya konflik dapat terkelola dan konflik terbuka antar etnis tidak terjadi lagi.

Daftar Pustaka

- Adnan, Abdul Hadi. 2006. dalam "Penyelesaian Masalah Sudan Selatan dan Krisis di Darfur." Diakses dari www.unpas.ac.id pada 12 Oktober 2013
- Azar, Edward. 1990. *The Management of Protracted Social Conflict: Theory and Cases.* Aldershot: Dartmouth.
- Durfee, Mary and James Rosenau. 1996. *Playing Catch up: International Relations Theory and Poverty in Millenium.* Vol 25, No.3.
- Fisher, R.J and Kcashly, L. 1991. *The Potential Complementarity of Mediation and Consultation within a Contingency Model of Third Party Intervention.* *Journal of Peace Research*, 28 (1), 29-42
- Galtung, Johan. 1975. *Three approaches to Peace: peacekeeping, peacemaking and peacebuilding.* Dalam *Peace, War and Defence – Copenhagen: Christian Ejlert* dikutip dalam Hugh Miall
- Glas, F. 1982. *The Process of Conflict Escalation and Roles of Third Parties,* in G.B.J Bomers and R.B Peterson, eds, *Conflict Management and Industrial Relations*, The Hague: Kluwer Nijhoff.

- Holsti, Kalevi. 1996. *The State, War and the State of War.* Cambridge: Cambridge University Press. hal. 20-21.
- Holsti, K.J. 1983. *International Politics, a Framework for Analysis, Fourth Edition.* Prentice-Hall, Inc.
- HPG Briefing Note. 2004. *Humanitarian Issues in Darfur.* Diakses dari www.odi.org/uk/hpg. Diakses pada 8 Oktober 2013
- Jemadu, Aleksius. 2008. *Politik Global dalam Teori dan Praktik Edisi Pertama.* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Jeong, Ho-Won. 2008. *Understanding Conflict and Conflict Analysis.* London: Sage Publication Ltd
- Miall, Hugh, 2004. *Conflict Transformation: A Multi-Dimensional Task, Berghof Research Center for Constructive Conflict Management, <http://www.berghof-handbook.net>*
- Mittelman, James H and Tambe, A. 2000. *Reconceptualizing Global Poverty: Globalization, marginalization and Gender.* In Wapner. Lanham: Rowman and Littlefie Publisher, Inc.
- Morgenthau, Hans J and Thompson, K. 1985. *Politics among Nations: The Struggle for Power, Sixth Edition.* New York: Alfred A Knopf, Inc
- Nuraeni, S., Silvy, Deasy dan Sudirman. 2010. *Regionalisme dalam Studi Hubungan Internasional.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Roy, S.L. 1984. *Diplomacy.* India: Sterling Publisher Pvt. Ltd.,
- United Nations News Centre. 2006. *4 Million People in Darfur Now Need Humanitarian Aid, Top UN Relief Official Says.* Diakses dari www.un.org/news. dalam Trish Chang 2007. *Displaced in Darfur* dalam KAIPTC Paper No. 18, June 2007 diakses pada 8 Oktober 2013
- Wallersten, Peter. 1997. *New Actors, New Issues, New Actions.* Department of Conflict and Peace Research: Uppsala University